

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di negara berkembang seperti Indonesia, peranan sumber daya manusia mengambil tempat yang sentral, khususnya dalam setiap pencapaian pembangunan ekonomi, di mana kesejahteraan manusia dijadikan tujuan pokok dalam ekonomi masyarakat. Dalam skala internasional dikenal tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals/MDG's*), yang disepakati oleh kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam KTT 2000. Tujuan MDG's tersebut antara lain, mengentaskan kemiskinan dan kelaparan ekstrem, mewujudkan pendidikan dasar universal, meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi tingkat mortalitas anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, menjaga kelestarian lingkungan hidup, membina kerja sama global dan mencapai tujuan pembangunan manusia.

Tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan rakyat. Manusia bukan hanya merupakan obyek pembangunan tetapi diharapkan dapat menjadi subyek, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan suatu wilayah yang secara makro menjadi kemajuan suatu Negara. Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter, dan paling populer saat ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI). Alat ukur ini diluncurkan oleh Mahbub

ul Haq dalam bukunya yang berjudul *Reflections on Human Development*, dan telah disepakati dunia melalui *United Nation Development Programme (UNDP)*. Besarnya angka indeks tersebut, secara simultan perlu diteliti beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap naik turunnya IPM .

IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk. Adapun tiga indikator tersebut, yaitu: 1) Indikator kesehatan, 2) Tingkat pendidikan, dan 3) Indikator ekonomi. Pendidikan dan Kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Menurut Meier dan Rauch (dalam Aloysius Gunadi Brata, 2002, Hal. 4) pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak.

Konsep Indeks Pembangunan Manusia IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah: 1) Peluang hidup (*longevity*), 2) Pengetahuan (*knowledge*), 3) Hidup layak (*living*

standard). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir, pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka.

Fakta ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dengan sendirinya menjamin terciptanya kesejahteraan masyarakat (trickle down effect). Banyak negara – termasuk Indonesia menerapkan strategi pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Tujuan pembangunan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator gross domestik product/gross national product (GDP/GNP). Jadi, dalam hal ini, disadari atau tidak disadari, manusia adalah sebagai input dalam proses pertumbuhan, bukan sasaran pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1990 United Nation Development Program (UNDP) memperkenalkan "Human Development Index" (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Munculnya HDI bukan berarti mengenyampingkan peran GDP, tetapi bagaimana menerjemahkan GDP tersebut ke dalam pembangunan manusia. Pembangunan manusia, menurut definisi UNDP, adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk (people's choice). Dari sekian banyak pilihan, ada tiga pilihan yang dianggap paling penting, yaitu: umur, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Pilihan lain yang dianggap mendukung tiga pilihan di atas adalah kebebasan politik, hak asasi manusia, dan penghormatan hak pribadi.

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi

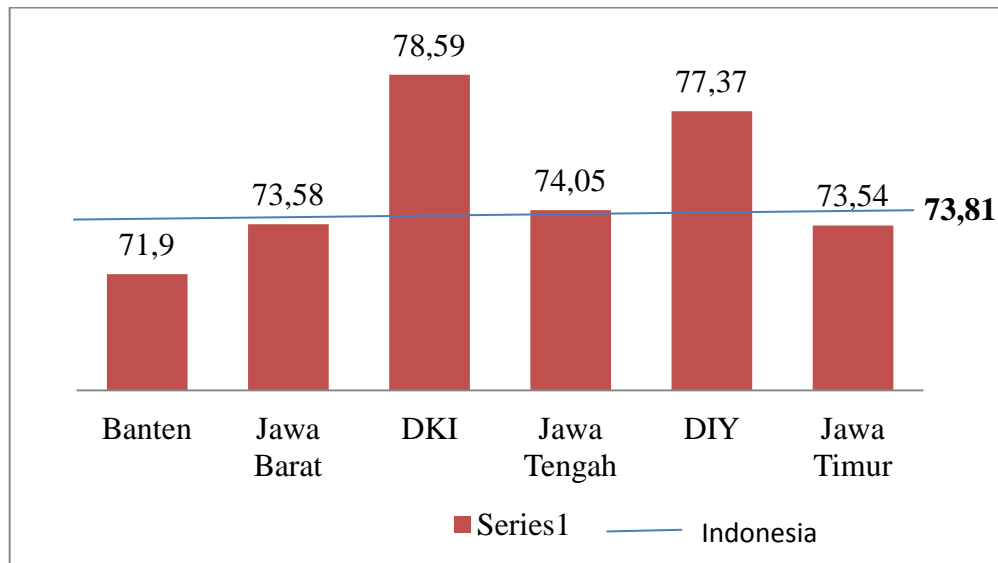
komoditas serta akumulasi modal. Alasan mengapa pembangunan manusia perlu mendapat perhatian adalah: pertama, banyak negara berkembang – termasuk Indonesia – yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan. Kedua, banyak negara maju yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi ternyata tidak berhasil mengurangi masalah-masalah sosial, seperti: penyalahgunaan obat, AIDS, alkohol, gelandangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, beberapa negara berpendapatan rendah mampu mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi karena mampu menggunakan secara bijaksana semua sumber daya untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia.

Untuk mengukur ketiga pilihan tersebut, UNDP menyusun suatu indeks komposit berdasarkan tiga indikator, yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (life expectancy at birth), angka melek huruf penduduk dewasa (adult literacy rate) dan -rata lama sekolah (mean years of schooling), dan kemampuan daya beli (purchasing power parity). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Rumah tangga memegang peranan penting dalam pembangunan manusia, di mana pengeluaran rumah tangga memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia, seperti: makanan, kesehatan dan pendidikan. Pengeluaran rumah tangga ditentukan oleh pendapatan. Penduduk miskin akan lebih banyak atau bahkan seluruh

pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makanan dibandingkan penduduk kaya. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak jika hanya mengandalkan pendapatannya.

Wilayah SUBOSUKA WONOSRATEN merupakan akronim dari Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah., SUBOSUKOWONOSRATEN (Kawasan Perkotaan Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten). Semua itu bertujuan supaya daerah dalam satu kawasan tersebut saling bekerjasama dan berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pemerataan dan pembangunan.

Pada Gambar 1.1 menunjukkan indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 sebesar 74,05, IPM ini berada di atas rata-rata IPM Nasional yaitu 73,81 dan apabila di bandingkan dengan Provinsi se Jawa, Provinsi Jawa Tengah berada pada posisi ke-3 (tiga) di bawah Provinsi DKI dan DIY yang indeks pembangunan manusianya jauh lebih tinggi.



Sumber: BPS,2015

Gambar 1.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi se Jawa dan Nasional Tahun 2013

Pada Tabel 1.1 menunjukkan IPM kabupaten/kota di SUBOSUKAWONOSRATEN dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2009 sampai 2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa kabupaten/kota di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN yang ternyata memiliki IPM di atas IPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013. Kabupaten/kota yang memiliki IPM diatas IPM Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Surakarta (79,10), Kabupaten Sukoharjo (74,91), Kabupaten Karanganyar (75,27) dan Kabupaten Klaten (74,91), sedangkan IPM yang dibawah IPM Prrovinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Boyolali (71,91), Kabupaten Wonogiri (73,09) dan Kabupaten Sragen (72,31). Semakin besarnya IPM suatu daerah mendekati skala angka 100, maka dianggap kualitas manusia didaerah tersebut bagus, sehingga

semakin mendukung pencapaian pembangunan ekonomi dan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan hidup penduduknya.

Tabel 1.1
IPM Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN
tahun 2009-2013

No	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kota Surakarta	77,49	77,86	78,18	78,60	79,10
2	Kab. Boyolali	70,44	70,72	71,25	71,50	71,88
3	Kab. Sukoharjo	73,29	73,57	73,97	74,21	74,91
4	Kab. Karanganyar	72,55	73,19	73,82	74,62	75,27
5	Kab. Wonogiri	71,04	71,33	71,86	72,59	73,09
6	Kab. Sragen	70,27	71,00	71,33	71,85	72,31
7	Kab. Klaten	73,41	73,83	74,10	74,46	74,91
	Prov. Jawa Tengah	72,10	72,49	72,94	73,36	74,05

Sumber: BPS, 2015

Pertumbuhan ekonomi dibutuhkan dan merupakan sumber utama peningkatan standar hidup (*standard of living*) penduduk yang jumlahnya terus meningkat. Dengan kata lain, kemampuan dari suatu negara untuk meningkatkan standar hidup penduduknya adalah sangat tergantung dan ditentukan oleh laju pertumbuhan ekonomi jangka panjangnya (*long run rate of economic growth*) (Nanga, 2005).

Menurut Bappenas (dalam Arsyad, 2010), kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Menurut Ravallion (2001), kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat.

Orang miskin umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.

Menurut Sukirno (2008), pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak digolongkan sebagai pengangguran

Dengan adanya permasalahan yang cukup rumit ini dan adanya perubahan inflasi di Indonesia, sehingga dalam hal ini penulis melakukan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan ini secara ilmiah, untuk mewujudkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI ,KEMISKINAN ,DAN PENGANGGURAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI WILAYAH SUBOSUKAWONOSRATEN TAHUN 2007-2013”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN?
2. Bagaimana pengaruh kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN?

3. Bagaimana pengaruh Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan Ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) Di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN
2. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN

D. Manfaat penelitian

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pemerintah khususnya Pemerintah dalam penentuan kebijakan dalam bidang ekonomi dan kependudukan khususnya bidang indeks pembangunan manusia.
2. Dapat memberikan informasi yang berguna bagi semua pihak yang terkait serta berkepentingan dengan masalah ini.

E. Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya baik dari perpustakaan dan laporan penelitian terdahulu yang dipublikasikan. Penelitian ini menggunakan gabungan data *cross section* ditujuh

Kabupaten/Kota SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) dan data *times series* selama 7 tahun yaitu dari tahun 2007-2013 sehingga dalam penelitian ini ada 56 observasi. Gabungan data *cross section* dan *times series* disebut data panel. Data diperoleh dari perpustakaan, website, jurnal atau penelitian sebelumnya dan dari instansi yang terkait dalam penelitian seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

Penelitian ini menganalisis hubungan antar variabel melalui data panel. Data panel merupakan kombinasi antara data runtut waktu, yang memiliki observasi temporal biasa pada suatu unit analisis dengan data silang tempat yang memiliki observasi-observasi pada suatu unit analisis pada suatu titik waktu tertentu.

Model regresi data panel biasa dirumuskan sebagai berikut¹

$$IPM_{it} = \alpha + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 KMS_{it} + \beta_3 TPT_{it} + u_{it}$$

Dimana:

IPM_{it} : Indeks Pembangunan Manusia untuk unit daerah ke-i dan unit waktu ke-t. (dalam skala 1-100)

PE_{it} : Pertumbuhan ekonomi untuk unit daerah ke-i dan unit waktu ke-t. (persen)

KMS_{it} : Kemiskinan untuk unit daerah ke-i dan unit waktu ke-t. (persen)

TPT_{it} : Pengangguran untuk unit daerah ke-i dan unit waktu ke-t. (persen)

Penelitian mereplikasi dari Denni Sulistio Mirza yang berjudul “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009”. (*Economics Development Analysis Journal 1(1) (2012)*).

KMS_{it} : Kemiskinan untuk unit daerah ke-i dan unit waktu ke-t.(persen)

i : Menunjukkan Kota/ Kabupaten

t : Menunjukkan deret waktu 2006-2013

α : koefisien intersep atau konstanta

β : Menunjukkan arah dan pengaruh masing-masing

u : Faktor gangguan atau tidak dapat diamati

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas tentang teori pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data penelitian, serta metode dan alat analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi pengolahan data dengan menggunakan Data Panel, pembahasan dan hasil analisis seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

BAB V PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran yang diajukan bagi pihak yang terkait dalam mengambil kebijakan terhadap permasalahan yang diteliti.

LAMPIRAN